



RENCANA KERJA TAHUN 2025  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

JALAN LINTAS GUNUNGTUA – LANGGAPAYUNG KM. 5 GUNUNGTUA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, Tim Penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara telah selesai menyusun Rancangan RENJA Tahun 2025. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan berpedoman kepada Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Sehubungan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmedagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara menyesuaikan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan urusan Pemerintah Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam fungsinya memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kelemahan, maka dengan rendah hati mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut serta agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun ke depannya.

Gunungtua, 19 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

MUHAMMAD ALI HASIBUAN, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIP. 19720512 199203 1 005

DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1    Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2    Landasan Hukum .....   | 2         |
| 1.3    Maksud dan Tujuan .....  | 3         |
| 1.4    Sistematika Penulisan .....  | 4         |
| <br>  |           |
| <b>BAB II       HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....</b>           | <b>7</b>  |
| 2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian<br>Restra OPD..... | 7         |
| 2.2    Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD.....                           | 13        |
| 2.3    Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....              | 13        |
| 2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                | 14        |
| 2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                   | 25        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III      TUJUAN DAN SASARAN OPD.....</b>                                 | <b>27</b> |
| 3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                               | 27        |
| 3.2    Tujuan dan Sasaran Renja.....  | 27        |
| 3.3    Program dan Kegiatan.....  | 28        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..</b>              | <b>47</b> |
| <br>  |           |
| <b>BAB V       PENUTUP.....</b>   | <b>48</b> |

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang. Salah satunya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bupati yang habis masa jabatannya tahun 2023 menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis tiga tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang lebih operasional.

Pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk membangun kualitas data base Kependudukan guna menjamin legalitas dokumen Kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta-Akta Pencatatan Sipil maupun surat keterangan Kependudukan lainnya. Data base Kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat serta berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara juga sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi dan APBN.

Selanjutnya agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran belanja dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul.

### 1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nobor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Reancana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalrifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026; dan
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk mengetahui arah pelaksanaan pembangunan daerah serta acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan program dan kegiatan skala prioritas yang memuat

rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dalam penyusunan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tahun 2025, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan hasil dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antar Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan

awal Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Renstra. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan
4. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hal analisis kebutuhan, serta mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan OPD berisi tentang Rencana Kerja Pendanaan Organisasi OPD.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 (Triwulan II tahun 2024). Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD tahun 2024 sejumlah Rp 3.655.331.354,-. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat terselesaikan seluruhnya dengan realisasi Rp 2.127.879.415,- atau sebesar 58,21%.

Pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

**1. Program Pendaftaran Penduduk**

Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan dengan target 74% realisasi 64,585% dengan capaian 87,28% dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Cakupan Perekaman KTP elektronik dengan target 98% realisasi 95,36% dengan capaiannya 97,31%, dan

b. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA dengan target 50% realisasi 33,81% dengan capaiannya 67,62%.

### 2. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase cakupan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target 97% realiasi 93,55% dengan capaian 96,44%, penjabaran dari indikator program ini adalah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dengan target 97% realisasi 93,55% dengan capaiannya 96,44%.

### 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan dengan target 100% realiasi 80% dengan capaian 80%, penjabaran dari indikator program ini adalah Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja dengan target 5 OPD realisasi 4 OPD sehingga tercapai 80%.

Berikut Tabel 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara:





|   |   |   |   |    |  |  |            |                 |  |  |    |         |    |         |      |    |         |   |         |     |
|---|---|---|---|----|--|--|------------|-----------------|--|--|----|---------|----|---------|------|----|---------|---|---------|-----|
|   |   |   |   | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Listrik yang disediakan                      | 12         | Laporan         |  |  | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100% | 4  | Laporan | 2 | Laporan | 17% |
|   |   |   |   | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan   | 36         | Laporan         |  |  | 2  | Laporan | 2  | Laporan | 100% | 12 | Laporan | 6 | Laporan | 17% |
|   |   |   | 2 | 09 | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                     | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                | <b>100</b> | <b>%</b>        |  |  |    |         |    |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 15         | Unit            |  |  | 5  | Unit    | 5  | Unit    | 100% | 5  | Unit    | 3 | Unit    | 20% |
|   |   |   |   | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 15         | Unit            |  |  | 4  | Unit    | 4  | Unit    | 100% | 5  | Unit    | 2 | Unit    | 13% |
| 2 | 1 | 0 |   |    | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>  | <b>PERSENTASE CAKUPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN</b>   | <b>71</b>  | <b>%</b>        |  |  |    |         |    |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   | 2 | 01 | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>Jumlah Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk</b>  | <b>9</b>   | <b>Kegiatan</b> |  |  |    |         |    |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 01 | Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan   | Jumlah dokumen hasil Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan              | 15         | Dokumen         |  |  |    |         |    |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 02 | Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk                                       | Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk        | 6000       | Dokumen         |  |  |    |         |    |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 04 | Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk   | Jumlah laporan hasil Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk  | 36         | Laporan         |  |  | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100% | 1  | Laporan | 1 | Laporan | 3%  |
|   |   |   | 2 | 04 | <b>Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>   | <b>Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>                   | <b>3</b>   | <b>Kegiatan</b> |  |  |    |         |    |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 02 | Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk                                   | 36         | Laporan         |  |  | 4  | Laporan | 4  | Laporan | 100% | 1  | Laporan | 1 | Laporan | 3%  |
| 2 | 1 | 0 |   |    | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>  | <b>PERSENTASE CAKUPAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL</b>   | <b>95</b>  | <b>%</b>        |  |  |    |         |    |         |      |    |         |   |         |     |

|   |   |   |   |    |  |  |    |                 |  |   |         |   |         |      |    |         |   |         |     |
|---|---|---|---|----|--|--|----|-----------------|--|---|---------|---|---------|------|----|---------|---|---------|-----|
|   |   |   | 2 | 01 | <b>Pelayanan pencatatan sipil</b>  | <b>Jumlah kegiatan Pelayanan pencatatan sipil</b>  | 1  | <b>Kegiatan</b> |  |   |         |   |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 01 | Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting        | Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting   | 30 | Dokumen         |  |   |         |   |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 02 | Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil   | Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan  | 12 | Layanan         |  | 4 | Layanan | 4 | Layanan | 100% | 4  | Layanan |   |         |     |
| 2 | 1 | 0 |   |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                           | <b>PERSENTASE PEMANFAATAN DATA INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                                   | 48 | %               |  |   |         |   |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   | 2 | 01 | <b>Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b> | <b>Jumlah kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b> | 3  | <b>Kegiatan</b> |  |   |         |   |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 01 | Pengolahan dan penyajian data kependudukan   | Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan   | 3  | Dokumen         |  | 5 | Dokumen | 5 | Dokumen | 100% |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 02 | Kerjasama pemanfaatan data kependudukan  | Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan   | 15 | Dokumen         |  |   |         |   |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   | 2 | 03 | <b>Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>                   | <b>Jumlah kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>                   | 2  | <b>Kegiatan</b> |  |   |         |   |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 01 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                          | 0  | Laporan         |  | 4 | Laporan | 4 | Laporan | 100% |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 04 | Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan  | Jumlah dokumen Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan   | 30 | Dokumen         |  |   |         |   |         |      | 10 | Dokumen | 5 | Dokumen | 17% |
|   |   |   |   | 05 | Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan                      | Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan                 | 6  | Laporan         |  |   |         |   |         |      |    |         |   |         |     |
|   |   |   |   | 07 | Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat            | Jumlah dokumen hasil Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat       | 3  | Dokumen         |  |   |         |   |         |      | 1  | Dokumen | 1 | Dokumen | 33% |

**2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD**

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitaas dan kualitas yang terukur.

Analisis kerja adalah suatu kegiatan untuk menelaah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang dilakukan apakah berhasil atau tidak untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari program / kegiatan yang dilaksanakan.

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara**

| No | Program/ Kegiatan                           | SPM/Standar Nasional | IKK   | Target Renstra Perangkat Daerah |       |       |       | Realisasi Capaian |        | Proyeksi |       | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|--------|----------|-------|------------------|
|    |   |                      |   | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  | 2023              | 2024   | 2025     | 2026  |                  |
| 1  | Program Pendaftaran Penduduk                |                      | Perekaman KTP elektronik  | 98%                             | 95%   | 95%   | 95%   | 95,36%            | 93,26% | 95%      | 95%   |                  |
| 2  | Program Pendaftaran Penduduk                |                      | Persenatse anak usia 0-17 tahun kuran 1 hari yang memiliki KIA                    | 50%                             | 35%   | 45%   | 50%   | 33,81%            | 32,68% | 45%      | 50%   |                  |
| 3  | Program Pencatatan Sipil                    |                      | Kepemilikan akta kelahiran  | 97%                             | 95%   | 95%   | 95%   | 93,55%            | 94,91% | 95%      | 95%   |                  |
| 4  | Program Informasi Administrasi Kependudukan |                      | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja | 5 OPD                           | 5 OPD | 5 OPD | 5 OPD | 4 OPD             | 2 OPD  | 5 OPD    | 5 OPD |                  |

**2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Adanya penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara yang tinggal di luar Kabupaten Padang Lawas Utara bahkan di luar pulau Sumatera dan di Luar Negeri sehingga tidak bisa hadir untuk melaksanakan rekam KTP elektronik.
2. Masih adanya pemahaman masyarakat yang kurang sadar mengurus langsung dokumen kependudukannya disaat mengalami peristiwa penting ataupun kependudukan seperti kelahiran bayi tidak langsung mengurus akta kelahiran dan perubahan data karena perkawinan, kematian dan perceraian (update data).
3. Masih adanya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara hanya membuat surat keterangan kelahiran dari tempat melahirkan dan surat keterangan kematian dari desa.
4. Masih kurang pahamnya orangtua akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak sehingga banyak orangtua tidak melengkapi berkas (syarat) pembuatan KIA ketika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pelayanan ke sekolah – sekolah.
5. Masih munculnya permasalahan NIK dan data bermasalah seperti data ganda/anomaly.
6. Ketersediaan Blangko, alat cetak serta tinta KTP elektronik dan KIA yang masih kurang mencukupi.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPD Kabupaten Padang lawas Utara. Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam RKPD;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas OPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, telah dilakukan langkah berikut:
  - a. Mengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
  - b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
  - c. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), telah dilakukan langkah berikut:
  - a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra OPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
  - b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
  - c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;

- d. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.

Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan dapat dilihat dari Tabel II.4 berikut ini :

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Padang Lawas Utara

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Rancangan RKPD  |                              |   |                   |     | Hasil Analisis Kebutuhan    |   |                              |   |                   |     | Catatan Penting |                   |
|----|---|------------------------------|---|-------------------|-----|-----------------------------|---|------------------------------|---|-------------------|-----|-----------------|-------------------|
|    | Program/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                            | Lokasi                       | Indikator kinerja   | Target<br>capaian |     | Pagu indikatif<br><br>(Rp.) | Program/<br>Kegiatan  | Lokasi                       | Indikator kinerja   | Target<br>capaian |     |                 | Kebutuhan<br>Dana |
|    |   |                              |   |                   |     |                             |   |                              |   |                   |     |                 | (Rp.)             |
| -1 | -2  | -3                           | -4  | -5                | -6  | -7                          | -8  | -9                           | -10   | -11               | -12 |                 |                   |
|    | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota       | Kabupaten Padang Lawas Utara | persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota                    | 100               | %   | 3.312.971.893               | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota       | Kabupaten Padang Lawas Utara | persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota                    | 100               | %   | 3.597.290.633   |                   |
|    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Padang Lawas Utara | Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3                 | Keg | 2.500.000                   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Padang Lawas Utara | Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3                 | Keg | 9.657.400       |                   |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 2                 | Dok | 1.000.000                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 2                 | Dok | 3.907.400       |                   |

|   |                                     |  |          |            |                      |   |                                     |  |          |            |                      |
|---|-------------------------------------|--|----------|------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|----------|------------|----------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-   | 2        | Dok        | 1.000.000            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1        | Dok        | 2.060.700            |
| Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD  | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2        | Dok        | 0                    | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD  | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2        | Dok        | 2.060.700            |
| Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4        | Lap        | 500.000              | Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4        | Lap        | 1.628.600            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>2</b> | <b>Keg</b> | <b>2.730.551.893</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>2</b> | <b>Keg</b> | <b>2.343.875.633</b> |

|  |                                     |  |          |            |                   |  |                                     |  |          |            |                    |  |
|--|-------------------------------------|--|----------|------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|----------|------------|--------------------|--|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                  | 21       | OB         | 2.576.111.893     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                  | 21       | OB         | 2.183.675.633      |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                 | 12       | Dok        | 154.440.000       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                 | 12       | Dok        | 160.200.000        |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>3</b> | <b>Keg</b> | <b>10.900.000</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>5</b> | <b>Keg</b> | <b>340.380.200</b> |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 4        | Paket      | 900.000           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 4        | Paket      | 3.210.200          |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | 5        | Paket      | 5.000.000         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | 5        | Paket      | 179.162.400        |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12       | Paket      | 0                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12       | Paket      | 17.409.600         |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 2        | Paket      | 2.000.000         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 2        | Paket      | 33.540.000         |  |

|   |                                     |  |          |            |                    |   |                                     |  |          |            |                    |
|---|-------------------------------------|--|----------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|----------|------------|--------------------|
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                   | 0        | Dok        | 0                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                   | .0       | Dok        | 0                  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                            | 12       | Lap        | 3.000.000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kabupaten Padang Lawas Utara        | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                            | 12       | Lap        | 107.058.000        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>1</b> | <b>Keg</b> | <b>0</b>           | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>1</b> | <b>Keg</b> | <b>0</b>           |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 1        | Unit       | 0                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 0        | Unit       | 0                  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>3</b> | <b>Keg</b> | <b>528.600.000</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>3</b> | <b>Keg</b> | <b>781.847.400</b> |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat  | 4        | Lap        | 600.000            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat  | 4        | Lap        | 2.000.000          |

|   |                                |  |          |            |                   |   |                                |  |          |            |                    |
|---|--------------------------------|--|----------|------------|-------------------|---|--------------------------------|--|----------|------------|--------------------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik  | Kabupaten Padang Lawas Utara   | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan                  | 4        | Lap        | 276.000.000       | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik  | Kabupaten Padang Lawas Utara   | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan                  | 4        | Lap        | 275.998.000        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Kabupaten Padang Lawas Utara   | jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12       | Lap        | 252.000.000       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Kabupaten Padang Lawas Utara   | jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12       | Lap        | 503.849.400        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>Kab. Padang Lawas Utara</b> | <b>Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>2</b> | <b>Keg</b> | <b>40.420.000</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>Kab. Padang Lawas Utara</b> | <b>Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>2</b> | <b>Keg</b> | <b>121.530.000</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Padang Lawas Utara   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 5        | unit       | 38.420.000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Padang Lawas Utara   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 5        | unit       | 85.520.000         |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kabupaten Padang Lawas Utara   | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 5        | Unit       | 2.000.000         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kabupaten Padang Lawas Utara   | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 5        | Unit       | 36.010.000         |

|  |  |                                     |   |            |          |                  |  |                                     |   |           |          |                    |
|--|--|-------------------------------------|---|------------|----------|------------------|--|-------------------------------------|---|-----------|----------|--------------------|
|  | <b>Program Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan</b>  | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>6.724.000</b> | <b>Program Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan</b>  | <b>71</b> | <b>%</b> | <b>132.278.400</b> |
|  | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                      | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Perekaman KTP</b>   | <b>98</b>  | <b>%</b> | <b>5.724.000</b> | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                      | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Perekaman KTP</b>   | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>108.680.400</b> |
|  | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan       | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan       | 5          | Dok      | 0                | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan       | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan       | 5         | Dok      | 0                  |
|  | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 2000       | Dok      | 0                | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 2000      | Dok      | 0                  |
|  | Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk                                 | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk                                 | 12         | Lap      | 5.724.000        | Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk                                 | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk                                 | 12        | Lap      | 108.680.400        |

|  |                                     |  |            |          |                  |  |                                     |  |            |          |                   |  |
|--|-------------------------------------|--|------------|----------|------------------|--|-------------------------------------|--|------------|----------|-------------------|--|
| <b>Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b> | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Kartu Keluarga</b>                                     | <b>98</b>  | <b>%</b> | <b>1.000.000</b> | <b>Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b> | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Kartu Keluarga</b>                                     | <b>98</b>  | <b>%</b> | <b>23.598.000</b> |  |
| Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk        | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 0          | Lap      | 1.000.000        | Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk        | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 12         | Lap      | 23.598.000        |  |
| <b>Program Pencatatan Sipil</b>                                      | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil</b>                           | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>1.000.000</b> | <b>Program Pencatatan Sipil</b>                                      | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil</b>                           | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>21.720.000</b> |  |
| <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                    | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Akta kelahiran</b>                                     | <b>97</b>  | <b>%</b> | <b>1.000.000</b> | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                    | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Cakupan Akta kelahiran</b>                                     | <b>97</b>  | <b>%</b> | <b>21.720.000</b> |  |
| Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil                               | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Layanan pencatatan Sipil yang ditingkatkan                            | 4          | Layanan  | 1.000.000        | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil                               | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Layanan pencatatan Sipil yang ditingkatkan                            | 4          | Layanan  | 21.720.000        |  |
| <b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>       | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan</b>       | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>1.000.000</b> | <b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>       | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Persentase Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan</b>       | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>29.820.000</b> |  |

|  |  |                                     |  |          |            |                  |  |                                     |  |          |            |                   |  |
|--|--|-------------------------------------|--|----------|------------|------------------|--|-------------------------------------|--|----------|------------|-------------------|--|
|  | <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b> | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Jumlah kegiatan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>                             | <b>1</b> | <b>Keg</b> | <b>1.000.000</b> | <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b> | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Jumlah kegiatan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>                             | <b>1</b> | <b>Keg</b> | <b>14.910.000</b> |  |
|  | Pengolahan dan Penyajian Data  | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan   | 2        | dok        | 1.000.000        | Pengolahan dan Penyajian Data  | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan   | 1        | dok        | 14.910.000        |  |
|  | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                   | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>             | <b>0</b> | <b>Keg</b> | <b>0</b>         | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                   | <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> | <b>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>             | <b>1</b> | <b>Keg</b> | <b>14.910.000</b> |  |
|  | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                       | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan                    | 0        | Lap        | 0                | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                       | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan                    | 0        | Lap        | 0                 |  |
|  | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat            | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 0        | Lap        | 0                | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat            | Kabupaten Padang Lawas Utara        | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1        | Lap        | 14.910.000        |  |

Review terhadap rancangan RKPD tahun 2024 dilakukan untuk membandingkan Rancangan (Renstra) terhadap analisis kebutuhan setelah diadakan musyawarah antar OPD dengan pemangku kepentingan dan menginagt kebutuhan sarana dan prasaran yang harus terpenuhi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 3.321.695.893,- dengan analisa kebutuhan sebesar Rp 3.781.109.033,-.

### 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh OPD kabupaten;
5. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kabupaten; dan
6. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kabupaten.

Akan tetapi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara belum mempunyai usulan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara**  
**Tahun 2025**

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1  | 2                | 3      | 4                 | 5               | 6       |
|    |                  |        |                   |                 | L       |
|    |                  |        |                   | I               |         |
|    |                  |        | H                 |                 |         |
|    |                  | I      |                   |                 |         |
|    | N                |        |                   |                 |         |

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN OPD**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat realisasi kinerja yang mengacu pada Standar Nasional/Lainnya dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun Standar Nasional lainnya.

**3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara harus dicapai melalui program dan kegiatan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara konsisten dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan sesuai tabel 3.2 yaitu :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
Tahun 2024-2026

| Tujuan   | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Tahun  |        |        |
|--|--|---|--------|--------|--------|
|  |  |   | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5      | 6      |
| Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     | Nilai Akip Disdukcapil  | 62%    | 65%    | 70%    |
|  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 77,38% | 78,15% | 79,71% |
|  |  | Persentase Dokumen dalam Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diterbitkan | 80%    | 82,50% | 84,25% |

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran Rp 3.157.590.133,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Program dan kegiatan rencana kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

| No | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN  |
|----|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |
| 2  |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |
| 3  |   |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |
| 4  |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 5  |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |
| 6  |   |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |
| 7  |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                    |
| 8  |   |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |
| 9  |   |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |
| 10 |   |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |
| 11 |   |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              |
| 12 |   |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |
| 13 |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   |
| 14 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |
| 15 |   |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |

## RENCANA KERJA TAHUN 2025

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 16 |   |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |
| 17 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 18 |   |   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |
| 19 | Program Pendaftaran Penduduk                            | Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   |
| 20 |   | Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                     | Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk  |
| 21 | Program Pencatatan Sipil                                | Pelayanan Pencatatan Sipil  | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil   |
| 22 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan   |
| 23 |   | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                   | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                  |

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu:

Tabel 3.3  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |         |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |         |   |  |                                  |  |   |  |                     |        |             | NASIONAL  | DAERAH |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10     | 11          | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                   |  |                                  |  |   |  | 3,781,109,033.00    |        |             |           |        |                  |                                   | 6,826,108,893.00    |                                   |
| 2  |         | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |  |                                  |  |   |  | 3,781,109,033.00    |        |             |           |        |                  |                                   | 6,826,108,893.00    |                                   |
|    | 2.12    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |                                  |  |   |  | 3,781,109,033.00    |        |             |           |        |                  |                                   | 6,826,108,893.00    |                                   |
| 1. | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 3,597,290,633.00    |        |             |           |        |                  | 100 %                             | 5,286,108,893.00    |                                   |

|                  |  |  |            |  |  |  |            |              |  |   |   |  |   |               |   |   |
|------------------|--|--|------------|--|--|--|------------|--------------|--|---|---|--|---|---------------|---|---|
| 2.12.01.2.01     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Kegiatan |  |  |  | 3 Kegiatan | 9,657,400.00 |  | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 3 Kegiatan                                  | 42,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |   |
| 2.12.01.2.01.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |            |  |  |  |            |              |  |   |   |  |   |               |   |   |
|                  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2 Dokumen  |  |  |  | 2 Dokumen  | 3,907,400.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM  | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 Dokumen     | 20,000,000.00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.01.002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |            |  |  |  |            |              |  |   |   |  |   |               |   |   |

|                  |   |  |  |           |  |  |           |              |  |                                      |   |  |   |           |              |   |
|------------------|---|--|--|-----------|--|--|-----------|--------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------|--------------|---|
|                  |   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen |  |  | 1 Dokumen | 2,060,700.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 Dokumen | 7,500,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.01.004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |           |  |  |           |              |  |                                      |   |  |   |           |              |   |
|                  |   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |           |  |  | 2 Dokumen | 2,060,700.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |           | 7,500,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.01.006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |           |  |  |           |              |  |                                      |   |  |   |           |              |   |

|                  |                                   |  |   |           |  |  |           |              |  |                                      |   |  |   |           |              |   |
|------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|--|--|-----------|--------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------|--------------|---|
|                  |                                   |  | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 4 Laporan |  |  | 4 Laporan | 1,628,600.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 Laporan | 3,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.01.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |   |           |  |  |           |              |  |                                      |   |  |   |           |              |   |
|                  |                                   |  | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   |           |  |  | 2 Laporan | 0.00         | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |           | 4,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

|                  |   |   |                |  |  |  |                |                  |  |   |   |  |   |                  |   |   |
|------------------|---|---|----------------|--|--|--|----------------|------------------|--|---|---|--|---|------------------|---|---|
| 2.12.01.2.02     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        | <i>Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 2 Kegiatan     |  |  |  | 2 Kegiatan     | 2,343,875,633.00 |  | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 2 Kegiatan                                  | 2,876,111,893.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |   |
| 2.12.01.2.02.001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             |   |                |  |  |  |                |                  |  |   |   |  |   |                  |   |   |
|                  |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>      | 21 Orang/bulan |  |  |  | 21 Orang/bulan | 2,183,675,633.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM  | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 21 Orang/bulan   | 2,576,111,893.00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.02.002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |   |                |  |  |  |                |                  |  |   |   |  |   |                  |   |   |

|                  |  |   |   |            |   |   |            |                |  |                                      |   |  |   |            |                |   |
|------------------|--|---|---|------------|---|---|------------|----------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------|----------------|---|
|                  |  |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | 12 Dokumen |   |   | 12 Dokumen | 160,200,000.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif                                 | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Dokumen | 300,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.05     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | - | -   | -          | - | - | -          | 0.00           |  |                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | -          | 315,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.05.002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |   |   |            |   |   |            |                |  |                                      |   |  |   |            |                |   |

|                  |  |   |   |            |  |  |         |                |  |                                      |   |  |   |            |                  |   |  |
|------------------|--|---|---|------------|--|--|---------|----------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------|------------------|---|--|
|                  |  |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |            |  |  | 1 Paket | 0.00           | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            | 200,000,000.00   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 2.12.01.2.05.009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |   |   |            |  |  |         |                |  |                                      |   |  |   |            |                  |   |  |
|                  |  |   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |            |  |  | 5 Orang | 0.00           | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            | 115,000,000.00   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 2.12.01.2.06     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | - |   | 5 Kegiatan |  |  | -       | 340,380,200.00 |  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif                                 | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 Kegiatan | 1,060,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 2.12.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |   |            |  |  |         |                |  |                                      |   |  |   |            |                  |   |  |

|                  |  |  |  |         |  |  |          |                |  |                                      |  |  |   |         |                |   |
|------------------|--|--|--|---------|--|--|----------|----------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---------|----------------|---|
|                  |  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket |  |  | 4 Paket  | 3,210,200.00   | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif                                 | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 Paket | 20,000,000.00  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             |  |  |         |  |  |          |                |  |                                      |  |  |   |         |                |   |
|                  |  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket |  |  | 5 Paket  | 179,162,400.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif                                 | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 Paket | 450,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |  |  |         |  |  |          |                |  |                                      |  |  |   |         |                |   |
|                  |  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |         |  |  | 12 Paket | 17,409,600.00  | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |         | 100,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |  |  |         |  |  |          |                |  |                                      |  |  |   |         |                |   |
|                  |  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket |  |  | 2 Paket  | 33,540,000.00  | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif                                 | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 Paket | 120,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |  |         |  |  |          |                |  |                                      |  |  |   |         |                |   |

|                  |  |  |   |            |  |  |               |                |  |                                      |  |  |   |            |                |   |  |
|------------------|--|--|---|------------|--|--|---------------|----------------|--|--------------------------------------|--|--|---|------------|----------------|---|--|
|                  |  |  | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | 3 Dokumen  |  |  | 3 Dokumen     | 0.00           | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 Dokumen  | 30,000,000.00  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 2.12.01.2.06.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |   |            |  |  |               |                |  |                                      |  |  |   |            |                |   |  |
|                  |  |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan    | 107,058,000.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif                                 | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Laporan | 270,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 2.12.01.2.06.010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |  |   |            |  |  |               |                |  |                                      |  |  |   |            |                |   |  |
|                  |  |  | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                         |            |  |  | 15000 Dokumen | 0.00           | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            | 70,000,000.00  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |

RENCANA KERJA TAHUN 2025

|                  |  |   |   |   |   |   |           |                |  |  |  |  |   |   |   |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|-----------|----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 2.12.01.2.07     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | -   | - | - | - | 0.00      | -              | -  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | -  | 50,000,000.00                               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |   |   |
| 2.12.01.2.07.002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |   |   |   |   |   |           |                |  |  |  |  |   |   |   |   |
|                  |  |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |   |   |   | 1 Unit    | 0.00           | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM   | -  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     | 50,000,000.00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |   |
| 2.12.01.2.08     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | - | 3 Kegiatan  |   |   |   | -         | 781,847,400.00 |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                               | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif   | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 3 Kegiatan                                  | 595,000,000.00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |   |
| 2.12.01.2.08.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |   |   |   |   |   |           |                |  |  |  |  |   |   |   |   |
|                  |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         |   |   |   | 4 Laporan | 2,000,000.00   | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif                                 | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 Laporan                               | 20,000,000.00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |   |   |   |   |   |           |                |  |  |  |  |   |   |   |   |

|                  |   |  |   |            |  |  |            |                |  |                                      |   |  |   |            |                |   |
|------------------|---|--|---|------------|--|--|------------|----------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------|----------------|---|
|                  |   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 4 Laporan  |  |  | 4 Laporan  | 275,998,000.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 Laporan  | 340,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |            |  |  |            |                |  |                                      |   |  |   |            |                |   |
|                  |   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                   | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 503,849,400.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Laporan | 235,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.09     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  | <i>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>    | 2 Kegiatan |  |  | 2 Kegiatan | 121,530,000.00 |  |                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 Kegiatan | 347,997,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.09.002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |   |            |  |  |            |                |  |                                      |   |  |   |            |                |   |

|    |                  |  |   |        |  |  |        |                |  |                                      |   |  |   |        |                |   |
|----|------------------|--|---|--------|--|--|--------|----------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--------|----------------|---|
|    |                  |  | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 5 Unit |  |  | 5 Unit | 85,520,000.00  | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 Unit | 207,997,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |   |        |  |  |        |                |  |                                      |   |  |   |        |                |   |
|    |                  |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   | 5 Unit |  |  | 5 Unit | 36,010,000.00  | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 Unit | 140,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | 2.12.02          | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK             | <i>Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan</i>  | 71 %   |  |  | 71 %   | 132,278,400.00 |  |                                      |   |  |   | 71 %   | 280,000,000.00 |   |

|                  |  |   |            |  |  |  |            |                |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |
|------------------|--|---|------------|--|--|--|------------|----------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------|----------------|---|
| 2.12.02.2.01     | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | 1 Kegiatan |  |  |  | 1 Kegiatan | 108,680,400.00 |  |                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Penduduk Padang Lawas Utara | 1 Kegiatan | 180,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.01.001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan       |   |            |  |  |  |            |                |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |
|                  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan |            |  |  |  | 5 Dokumen  | 0.00           | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Penduduk Padang Lawas Utara |            | 30,000,000.00  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.01.002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk |   |            |  |  |  |            |                |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |

|                  |   |   |   |            |  |  |                          |                |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |  |
|------------------|---|---|---|------------|--|--|--------------------------|----------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------|----------------|---|--|
|                  |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk |            |  |  | 2000 Dokumen             | 0.00           | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Penduduk Padang Lawas Utara |            | 70,000,000.00  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 2.12.02.2.01.004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                    |   |   |            |  |  |                          |                |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |  |
|                  |   |   | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                 | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan               | 108,680,400.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Penduduk Padang Lawas Utara | 12 Laporan | 80,000,000.00  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 2.12.02.2.04     | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                   | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 23,598,000.00  |  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Penduduk Padang Lawas Utara | 1 Kegiatan | 100,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 2.12.02.2.04.002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk         |   |   |            |  |  |                          |                |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |  |

RENCANA KERJA TAHUN 2025

|    |                  |   |   |            |  |  |            |               |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |
|----|------------------|---|---|------------|--|--|------------|---------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------|----------------|---|
|    |                  |   | <i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk</i>                                     | 12 Laporan |  |  | 12 Laporan | 23,598,000.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polihukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Penduduk Padang Lawas Utara | 12 Laporan | 100,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | 2.12.03          | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>   | <b><i>Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil</i></b>   | 95 %       |  |  | 95 %       | 21,720,000.00 |  |                                      |   |  |                             | 95 %       | 380,000,000.00 |   |
|    | 2.12.03.2.01     | Pelayanan Pencatatan Sipil  | <i>Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</i>   | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan | 21,720,000.00 |  |                                      | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Penduduk Padang Lawas Utara | 1 Kegiatan | 380,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.01.001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting |   |            |  |  |            |               |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |
|    |                  |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i> |            |  |  | 10 Dokumen | 0.00          | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Penduduk Padang Lawas Utara |            | 200,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.01.002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                      |   |            |  |  |            |               |  |                                      |   |  |                             |            |                |   |
|    |                  |   | <i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</i>  | 4 Layanan  |  |  | 4 Layanan  | 21,720,000.00 | Kab. Padang Lawas Utara,                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum,  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan   | Penduduk Padang Lawas Utara | 4 Layanan  | 180,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

|    |                  |   |  |            |  |  |  |               |  |                                      |  |  |                        |            |                |   |
|----|------------------|---|--|------------|--|--|--|---------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------|----------------|---|
|    |                  |   |  |            |  |  |  |               | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                          | ALOKASI UMUM                         | dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                      |                        |            |                |   |
| 4. | 2.12.04          | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                           | -  | -          |  |  |  | 29,820,000.00 |  |                                      |  |  |                        | -          | 880,000,000.00 |   |
|    | 2.12.04.2.01     | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | -  | 1 Kegiatan |  |  |  | 14,910,000.00 |  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                                 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD Padang Lawas Utara | 1 Kegiatan | 345,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.01.001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan  |  |            |  |  |  |               |  |                                      |  |  |                        |            |                |   |
|    |                  |   | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 1 Dokumen  |  |  |  | 14,910,000.00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                                 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD Padang Lawas Utara | 1 Dokumen  | 220,000,000.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |



**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil" serta 2 (dua) sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil" dan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rancangan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan rewiu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dan Evaluasi Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun anggaran 2025.

Gunungtua, 19 Juli 2024

DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

MUHAMMAD ALI HASIBUAN, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIP. 19720512 199203 1 005